

## ANALISIS PARTAI POLITIK ISLAM PRA HINGGA PASCA KEMERDEKAAN 1910-1960 : SEBUAH KAJIAN ISLAM FORMALIS

**Miqdad Syukril iman**

Pendidikan sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Email: [Miqdadsyukril123@gmail.com](mailto:Miqdadsyukril123@gmail.com)

### ABSTRAK

Artikel ini akan mencoba menelaah bagaimana peran dari kemunculan partai politik yang bernuansa islam dari mulai masa pergerakan, pra kemerdekaan hingga pasca kemerdekaan di indonesia. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka (library research) dengan menelaah penelitian yang sudah ada sebelumnya kemudian di analisis kekurangan dari penelitian-penelitian tersebut kemudian dijabarkan. Partai politik islam muncul dan lahir di indonesia atas adanya keinginan para cendekiawan dan masyarakat islam untuk menjadikan indonesia merdeka dengan memiliki asas islam. Dalam perkembangannya partai politik islam timbul dari berbagai organisasi yang muncul dari beberapa elemen islam pada masa kemerdekaan. Hal tersebut menjadi awal ideologi islam mulai muncul dan berkembang hingga setelah kemerdekaan diraih oleh bangsa indonesia ideologi islam diteruskan dalam pembentukan partai politik. Masyumi dan NU menjadi partai politik terbesar yang dibentuk dan berkembang di indonesia tahun 1945 an. Kedua partai tersebut memiliki masing-masing strategi dalam memperjuangkan kemaslahatan umat islam di indonesia.

**Kata kunci:** Partai Politik , Islam , Kemerdekaan

### ABSTRACT

*This article will try to examine the role of the emergence of political parties with Islamic nuances from the movement period, pre-independence to post-independence in Indonesia. This study uses a descriptive qualitative design with a library research approach by examining previous research and then analyzing the shortcomings of these studies and then describing them. Islamic political parties emerged and were born in Indonesia because of the desire of scholars and the Islamic community to make Indonesia independent by having Islamic principles. In its development, Islamic political parties emerged from various organizations that emerged from several Islamic elements during the independence period. This was the beginning of Islamic ideology starting to emerge and develop until after independence was achieved by the Indonesian nation, Islamic ideology was continued in the formation of political parties. Masyumi and NU became the largest political parties that were formed and developed in Indonesia in the 1945s. The two parties have their respective strategies in fighting for the benefit of Muslims in Indonesia.*

**Keywords:** Political Party, Islam, Independence

### A. PENDAHULUAN

Perjalanan bangsa indonesia setelah pasca kemerdekaan mengalami berbagai transformasi di setiap elemennya, berbagai bentuk sistem ketatanegaraan coba dibentuk dalam sebuah kemasn yang memiliki tujuan untuk menjadikan bangsa indonesia bisa berkembang di awal

kemerdekaannya. Selama proses kemerdekaan terjadi berbagai permasalahan yang di timbul dari mulai pembentukan dasar negara hingga persiapan untuk memulai menjadi negara baru<sup>1</sup>. Menyoroti peristiwa tanggal 1 juni 1945 dimana soekarno menyampaikan sebuah gagasan yang tersusun dalam pidatonya yang terkenal bernama pantja sila. Pidato ini mengalami berbagai kontroversial terutama pada sila yang pertama yang berbunyi “ketuhanan yang maha esa”. sila tersebut di kecam oleh sebagian kalangan islam dimana dari kubu islam menganggap bahwa diksi sila pertama tersebut mempunyai konotasi yang kurang jelas, hal tersebut dari kalangan islam menyarankan agar sila pertama di tambahkan “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Penambahan diksi ini menimbulkan perdebatan yang alot di mana singkat perjalanan saran tersebut ditolak dan tidak berhasil dimasukkan tepat diputuskan pada tanggal 18 Agustus 1945<sup>2</sup>. Hal ini memicu pergolakan elemen islam dengan kelompok nasionalis. Dari putusan tersebut juga berdampak kepada arah gerak dari partai politik yang bernuansa islam hingga masa pemilu pertama tahun 1955<sup>3</sup>.

Sebuah anggapan berkaitan realitas partai politik menurut islam dengan sebutan siyasah. Siyasah yang dimaksud merupakan sebuah ungkapan yang mengarah kepada urusan umat. Dikutip dari zainullah bahwa siyasah yang dimaksud adalah politik yang mengatur urusan-urusan umat islam di mana dalam sejarahnya islam sangat membenci dan mencela orang-orang yang tidak mau tahu berkaitan dengan urusan umat. Dalam sebuah orientasi kekuasaan, siyasah mempunyai arti dan pemahaman lain dimana islam dalam orientasi tersebut hanya berfokus menjadi sebuah sarana di dalam memecahkan sebuah masalah kekuasaan<sup>4</sup>.

Beberapa elemen masyarakat hanya mengartikan politik islam merupakan sebuah politik yang menganut perspektif islam. Hal tersebut cukup ditolerir yang mana pada kemunculan partai politik tahun 40 an hingga tahun 60 an memegang prinsip partai politik yang mengarah kepada ajaran islam. Partai politik yang bernuansa islam bisa dibilang memiliki sebuah konsepi yang berbeda mengenai politik namun tidak bisa dipungkiri juga bahwa partai-partai islam yang muncul pada orde lama hingga reformasi selalu terbuka terhadap perkembangan politik dari pihak lain sehingga partai politik islam selalu menyesuaikan politik yang semakin berkembang<sup>5</sup>.

---

<sup>1</sup> Giri Argenti and Maulana Rifai, “Islam Politik Era Refomasi Pergulatan Ideologi Partai Politik Islam Antara Formalis dan Subtansi,” *Majalah Ilmiah SOLUSI* 1, no. 04 (2014), accessed September 28, 2022, <https://journal.unsika.ac.id/index.php/solusi/article/view/63>.

<sup>2</sup> Ikrar Ikrar, “PARTAI-PARTAI ISLAM DI INDONESIA (Latar Belakang dan Dinamika Perjalanannya),” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 1, no. 2 (August 11, 2016), accessed September 28, 2022, <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/199>.

<sup>3</sup> Jainuddin Jainuddin, “ISLAM DAN POLITIK ORDE LAMA; ‘DINAMIKA POLITIK ISLAM PASCA KOLONIAL SEJAK KEMERDEKAAN SAMPAI AKHIR KEKUASAAN SOEKARNO,’” *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 3, no. 2 (October 14, 2019): 225–243.

<sup>4</sup> Ikrar, “PARTAI-PARTAI ISLAM DI INDONESIA (Latar Belakang dan Dinamika Perjalanannya).”

<sup>5</sup> Dr Sukanto, “DINAMIKA POLITIK ISLAM DI INDONESIA” (n.d.): 30.

Dalam perjalanan Indonesia pada masa orde lama terdapat partai politik Islam terbesar dalam sejarahnya yaitu Masyumi. Partai politik ini merupakan perwajahan Islam formalis dimana Islam formalis menurut Munawir dalam konsepsi politik memiliki pendirian bahwa Islam mempunyai seperangkat sistem politik atau siyasah yang berbeda dan hal tersebut harus diperjuangkan karena memang pada dasarnya Islam formalis menganut sistem politik yang ingin menguasai sebuah negara dengan sistem politiknya. Partai politik ini yaitu Masyumi menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan formalisme syariah dengan menyetujui dasar negara dalam sebuah negara berdasarkan ajaran Islam bukan Pancasila. Ditegaskan pula dalam pernyataan salah satu tokoh Masyumi yang menyatakan bahwa Pancasila tidak bisa dijadikan sebagai sebuah ideologi negara<sup>6</sup>.

Pada artikel ini penulis mencoba membedah bagaimana realitas perkembangan partai politik Islam dimulai dari pembentukan, perkembangan hingga pengaruh dari adanya partai politik Islam pada Indonesia. Mengingat begitu luasnya bahasan topik yang berkaitan dengan Islam dan partai politik di Indonesia, penelitian ini membatasi penulisannya mengenai perkembangan partai politik Islam sebelum hingga pasca kemerdekaan (demokrasi liberal).

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

Berkaitan dengan penelitian terdahulu berkaitan dengan partai politik Islam di Indonesia banyak dilakukan oleh beberapa peneliti salah satunya karya dari Gili Argenti dan Maulana Rifai yang hasilnya menjabarkan pergulatan Islam dalam bidang politik pasca kemerdekaan<sup>7</sup>. Dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa elemen Islam mengalami fluktuatif atau pasang surut dalam perkembangannya. Dijelaskan lebih lanjut bahwa Islam dalam partai politiknya mendapatkan tekanan yang cukup tersudutkan dalam perkembangan Indonesia. Kemudian dalam penelitian lain karya Ikrar di jelaskan bagaimana berdirinya partai politik Islam setelah kemerdekaan (Ikrar, 2016)<sup>8</sup>. Hasil dari penelitian ini disebutkan bahwa partai politik Islam mempunyai peran sebagai sebuah penggerak roda masyarakat Islam pada masa itu. Masyumi menduduki tahta tertinggi dalam berpakaian yang bernuansa Islam pada saat itu. Hal tersebut juga dijelaskan bagaimana relevansi terkait dengan partai politik praktis yang terjadi sekarang dengan munculnya partai politik pada masa tersebut.

Dari penelitian terdahulu yang sudah dijelaskan maka penelitian ini akan mencoba kembali membedah bagaimana realitas partai politik Islam di Indonesia. Yang menjadi unsur kebaruan pada penelitian ini adalah unsur temporal dalam ruang lingkupnya dimana pada penelitian yang coba

---

<sup>6</sup> Argenti and Rifai, "Islam Politik Era Reformasi Pergulatan Ideologi Partai Politik Islam Antara Formalis dan Subtansi."

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> Sukanto, "DINAMIKA POLITIK ISLAM DI INDONESIA."

akan dikaji ini lebih berfokus pada penjelasan mengenai asal mula ideologi islam dalam partai politik di indonesia dimana dijelaskan lebih lanjut berbagai organisasi yang muncul pada masa pergerakan hingga pra kemerdekaan. Selain itu juga pada penelitian ini akan berfokus kepada dampak yang ditimbulkan akan lahirnya berbagai partai politik islam di indonesia.

### **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka (*library Research*), dimana studi pustaka menurut mestika zed didefinisikan sebagai teknik pengumpulan data dengan mencari buku-buku ataupun literatur hingga laporan yang mempunyai kemiripan dan keterhubungan terhadap permasalahan yang akan diselesaikan<sup>9</sup>. Dalam teknik pengumpulan data ini peneliti akan mencoba menganalisis hingga menguraikan literatur terkait berkaitan dengan topik yang akan diteliti yang kemudian akan diuraikan dan dijabarkan sesuai dengan permasalahan yang akan diangkat. Dalam menentukan literatur, jurnal maupun berbagai publikasi peneliti akan melakukan serangkaian tahap dari pendeskripsian, kritik sumber hingga akhirnya akan memunculkan output untuk digunakan dalam penguraian penelitian ini<sup>10</sup>. Penelitian ini akan dibagi menjadi berbagai sub bab yang saling terhubung di mulai dari a). Islam, Partai Dan Politik sebelum hingga Pasca Kemerdekaan dan b). Masyumi sebagai partai politik islam terbesar pasca kemerdekaan Penelitian ini akan berfokus kepada perkembangan partai politik islam yang akan dijabarkan di tiap-tiap sub babnya.

### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Islam, Partai Dan Politik sebelum hingga Pasca Kemerdekaan**

Perkembangan partai politik islam dari masa ke masa mengalami berbagai dinamika yang cukup baik. Organisasi hingga elemen islam memiliki pengaruh yang kuat dalam kemerdekaan bangsa indonesia<sup>11</sup>. Hal tersebut dapat dibuktikan adanya perkumpulan para pemimpin islam menjelang masa kemerdekaan yang tujuan utama perkumpulan tersebut untuk memikirkan bagaimana bangsa indonesia bisa merdeka. Meskipun jika dilihat dalam kaca mata positif elemen islam memiliki pengaruh yang kuat akibat munculnya para organisasi hingga pemimpin yang benuansa islam, dalam sejarah kelamnya elemen islam mendapatkan berbagai tantangan dalam membangun pondasi dalam membentuk negara indonesia baik menuju kemerdekaan hingga pasca kemerdekaan. Dikutip dari jurnal Al-Syir'ah Vol. 1 No. 2

---

<sup>9</sup> Wahyudin Darmalaksana, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan," *Pre-print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung* (2020), accessed October 13, 2022, <http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/32855>.

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar ilmu politik*, Cet. pert. rev. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).

karya ikrar dijelaskan bahwa partai islam sebelum kemerdekaan islam dimaksudkan kepada sebuah perkumpulan atau golongan yang menjadikan agama islam sebagai dalam dasarnya<sup>12</sup>. Dimana dijelaskan lebih lanjut mengenai organisasi-organisasi yang memiliki asas, tujuan hingga sehaluan islam sudah banyak terbentuk pada masa pergerakan indonesia seperti pembentukan sarekat islam, Nahdlatul ulama dan Muhammadiyah.

Sarekat islam (SI) menjadi partai islam atau organisasi yang pertama dibentuk. Dalam sumbangsuhnya, organisasi Sarekat Islam memiliki berbagai pengaruh dalam perkembangan politik di indonesia. Dalam arah geraknya SI tidak semata-mata hanya berfokus kepada masyarakat islam semata namun organisasi ini memiliki arah gerak yang fleksibel terutama dalam bidang perdagangan<sup>13</sup>. Organisasi ini sudah mencapai berbagai capaian yang terhimpun dalam tujuan pembentukan organisasi tersebut diantaranya:

- Pencapaian hubungan kompetisi yang semakin baik dan meningkat dalam bidang perdagangan, terutama dengan golongan-golongan cina hal tersebut dapat dibuktikan dengan keberhasilan revolusi Cina pada tahun 1911
- Melerai kerusuhan dan problem dari masyarakat indonesia khususnya masyarakat di sekitar bengawan solo hal ini dibuktikan dengan diadakannya pertemuan pada tanggal 11 November 1912

Pasca adanya kerusuhan dan perpecahan organisasi SI akibat masuknya tokoh yang sudah tidak berhaluan islam (komunis) menyebabkan kemunduran organisasi tersebut pada tahun 1918. Di samping kemunduran organisasi SI, muncul sebuah organisasi islam yang memiliki nama Muhammadiyah pada tanggal 18 november 1912<sup>14</sup>.

Pada mulanya muhammadiyah dibentuk karena adanya desakan yang diberikan oleh aktivis kristen dalam menyebarluaskan pahamnya di bidang pendidikan. Hal tersebut memicu gesekan kontradiktif yang menyebabkan organisasi muhammadiyah ini dibentuk oleh para aktivis islam. Muhammadiyah menjadi sebuah organisasi sosial yang menaungi bidang pendidikan hingga sosial masyarakat indonesia. Muhammadiyah di gadang-gadang menjadi sebuah organisasi pembaharuan islam yang ada di indonesia yang membawa prinsip untuk

---

<sup>12</sup> Ikrar, "PARTAI-PARTAI ISLAM DI INDONESIA (Latar Belakang dan Dinamika Perjalanannya)."

<sup>13</sup> Amos Sukanto, "Ketegangan Antar Kelompok Agama Pada Masa Orde Lama Sampai Awal Orde Baru: Dari Konflik Perumusan Ideologi Negara Sampai Konflik Fisik," *Indonesian Journal of Theology* 1, no. 1 (July 21, 2013): 25–47.

<sup>14</sup> Anis Anis, "Muhammadiyah Dalam Penyebaran Islam," *Jurnal Mimbar: Media Intelektual Muslim dan Bimbingan Rohani* 5, no. 2 (October 7, 2019): 65–80.

meningkatkan kualitas dan kemaslahatan umat<sup>15</sup>. Dalam aspek politik muhammadiyah memiliki pandangan yang cukup beragam dalam perkembangannya. Di satu waktu organisasi tersebut memihak pemerintah, di satu waktu juga muhammadiyah mengambil sikap kritis kepada pemerintah. Namun satu hal yang perlu dijelaskan bahwa muhammadiyah pada saat itu menjadi sebuah organisasi islam yang independen dan tidak memihak berbagai partai politik pada masa tersebut.

Tidak jauh berbeda dengan muhammadiyah sebuah organisasi islam muncul yang dinamai Nahdlatul ulama (NU). Dalam perkembangannya NU berdiri pada bulan januari 1926 dan merupakan sebuah organisasi islam yang banyak di katakan islam tradisional. Dalam bidang politik NU memiliki kesamaan dengan muhammadiyah dengan sikap skeptis terhadap pemerintahan dan memang fokus utamanya pada saat itu menjadi jembatan atau wadah masyarakat untuk meningkatkan kualitas umatnya<sup>16</sup>.

Organisasi-organisasi yang terbentuk pada masa pergerakan hingga sebelum kemerdekaan ini menjadi stimulus masyarakat islam di dalam membantu berbagai permasalahan bangsa indonesia. Bangsa indonesia yang memang memiliki keinginan akan kemerdekaannya menjadi tujuan utama organisasi-organisasi islam terbentuk. Di samping yang sudah dijelaskan bahwa dalam aspek politik organisasi-organisasi islam kurang ikut andil secara langsung dalam perlawanan pemerintah belanda , namun organisasi tersebut terbilang sukses untuk menjadi tempat buat tempaan masyarakat islam dalam membangun ideologi nasionalis dan islamis. Hingga setelah bangsa indonesia berhasil mencapai kemerdekaannya organisasi islam menjadi jalan dari berdirinya partai politik islam pada masa itu.

Dalam perkembangannya pada tahun 1930 an SI semakin mengalami kemunduran hal tersebut didasari adanya ideologi komunis yang mulai menyusup ke dalam organisasi tersebut<sup>17</sup>. yang berdampak terhadap sumbangsing kepada perpolitikan di indonesia yang semakin mengecil. Sekitar tahun 1933 soekiman di pecat dalam keanggotaan SI<sup>18</sup>. kekecewaan yang dialami soekiman membuat ia membuat sebuah partai politik yang dinaungi beliau dengan nama partai islam indonesia (PII) pada tahun 1938. Pembentukan partai ini ternyata mendapat dukungan dari berbagai pihak elemen organisasi islam pada masa itu seperti muhammadiyah, persis, thawalib hingga bekas anggota dari permi yang berada di

---

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> Moh Nafi', "NU DALAM PERKEMBANGAN PEMIKIRAN PENDIDIKAN ISLAM," *Ta'Limuna: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (June 22, 2018): 96–112.

<sup>17</sup> - Taufik Karim Lubis, "PERANAN SEMAUN DALAM PERKEMBANGAN SAREKAT ISLAM SEMARANG TAHUN 1914-1920" (other, Universitas Pendidikan Indonesia, 2017), accessed October 11, 2022, <http://repository.upi.edu>.

<sup>18</sup> Ibid.

daerah Sumatera.

Adanya partai politik Islam yang muncul menjadi sebuah masa yang baru terhadap dunia perpolitikan terutama politik Islam dimana sejak tahun ke 1930-an SI bukan menjadi partai politik independen melainkan harus bersinggungan dengan partai-partai baru yang lahir pada masa itu. Selain partai Islam yaitu PII, munculnya partai yang berbasas nasionalis juga terlahir pada masa tersebut. Partai Nasional Indonesia (PNI) dibentuk pada bulan April 1927 di bawah pemimpin Ir. Soekarno menjadi partai baru yang terlahir dengan mengemban tujuan menjadikan Indonesia merdeka yang bersifat sekuler<sup>19</sup>.

Munculnya berbagai partai politik yang bersifat sekuler menjadi sebuah gertakan dan kesadaran dari berbagai pemimpin Islam dan alim ulama pada saat itu. Munculnya PNI menjadi langkah awal yang ditunjukkan dalam semakin berkembang dan dominan kelompok nasional bersifat sekuler dalam kancah perpolitikan di Indonesia. Meski memang PNI akhirnya dibubarkan tepat setelah satu tahun parpol tersebut berdiri, akan tetapi doktrinasi hingga ideologinya masih di teruskan oleh berbagai organisasi yang berada di naungannya dan melahirkan sebuah partai politik baru yang memiliki asas sama seperti PNI.

Semakin lemahnya elemen Islam juga dirasakan ketika lahirnya sebuah badan yang disebut BPUPKI. Hal ini di samping karena pembentukan badan tersebut tidak terikat dalam partai maupun agama Islam, hal ini juga didasari dengan anggota-anggota yang tergabung dalam organisasi tersebut yang sebagian merupakan kelompok nasional sekuler. Dari pernyataan tersebut semakin terlihat bahwa pada masa tersebut elemen Islam tidak menjadi pengaruh yang kuat dalam pembentukan berbagai kekuatan untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia<sup>20</sup>.

Hingga akhirnya setelah Indonesia berhasil mencapai kemerdekaannya tahun 1944-1945-an partai politik Islam masih belum menemukan titik terang dalam perkembangannya. Di samping adanya berbagai kelompok lain yang muncul hal tersebut juga berakibat mengenai perumusan dasar negara. Dalam perkembangannya ketika sidang PPKI terdapat perdebatan panjang mengenai perumusan dasar negara yang akan ditetapkan. Dalam perdebatan tersebut ada dua kelompok yang memiliki pandangan berbeda dalam pembentukan dasar negara. Pertama, kelompok nasionalisme Islam yang berpandangan ingin menjadikan negara Indonesia sebagai sebuah negara Islam yang memakai dasar negara serta undang-undang berbasas Islam. Sedangkan dari kelompok lain yang terhimpun dalam golongan nasionalis

---

<sup>19</sup> Sukamto, "Ketegangan Antar Kelompok Agama Pada Masa Orde Lama Sampai Awal Orde Baru."

<sup>20</sup> Ikrar, "PARTAI-PARTAI ISLAM DI INDONESIA (Latar Belakang dan Dinamika Perjalanannya)."

sekuler memiliki pandangan bahwa dasar negara indonesia harus memiliki dasar negara yang general dan mencakup semua agama yang terhimpun dalam pancasila<sup>21</sup>. dalam pertemuan ini masing masing kelompok membawa delegasi di antaranya :

Delegasi Nasional Islam	Delegasi Nasional Sekuler
H. Agus Salim	Ir. Soekarno
Kh. Wahid Hasyim	M. Hatta
A Kahar Muzakkir	A Soebardji
Abikusno	A Maramis

Table 1. delegasi pertemuan pada sidang PKKI

Dalam pertemuan tersebut diperoleh sebuah keputusan yang disebut dengan piagam jakarta. keputusan yang menyatakan pancasila sebagai dasar negara hal ini menjadi bukti dalam pertemuan tersebut kubu nasionalis islam mengalami kekalahan. Namun satu hal yang perlu dijelaskan bahwa keputusan pancasila pada awalnya masih memasukan ketentuan mengenai umat islam pada sila pertamanya yang berbunyi “ ketuhanan yang maha esa dengan menjalankan kewajiban bagi umat islam bagi pemeluknya”. Hal ini mampu diterima oleh para cendekiawan dan organisasi islam meskipun memang memperoleh kekecewaan . akan tetapi sila pertama ini akhirnya dihapus dan diganti dengan diksi general atau umum karena memang banyaknya tekanan dari kubu nasionalis sekuler pada saat itu<sup>22</sup> .

Dari momen ini para elemen islam dan organisasinya mengalami kekecewaan yang sangat berat dan para cendekiawan muslim bahwa keputusan ini menjadi akhir dari kekalahan politik kelompok islam pada saat tersebut. Meskipun memang keputusan tersebut disinyalir menjadi sebuah keputusan yang menjadi bukti kekalahan politik, pihak kelompok islam tidak diam. Pasca kemerdekaan para kelompok islam mendirikan sebuah partai politik baru yang menjadi wadah untuk memperjuangkan islamisme di indonesia.

## 2. Masyumi sebagai partai politik terbesar pasca kemerdekaan

Kemunculan partai politik pasca kemerdekaan merupakan sebuah wujud kebangkitan

<sup>21</sup> Kelompok Nasional sekuler merupakan sebuah kelompok yang memandang bangsa indonesia tidak bisa memiliki dasar pada satu agama tertentu. Sumber : Anjar Nugroho, “Wacana Islam Dan Negara Era Pra-Kemerdekaan: Pergulatan Ideologis Kelompok Islam Dan Nasionalis Sekuler,” *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies* 9, no. 2 (July 28, 2013): 129–147.

<sup>22</sup> Noor Ishak, “PERGERAKAN PARTAI MASYUMI DI INDONESIA 1945-1960” (2008): 108.

nasionalisme islam pada masa pasca kemerdekaan. Setidaknya ada dua kelompok islam yang membentuk sebuah partai politik untuk kembali memperjuangkan islam dalam memperoleh konstitusinya sebagai dasar utama bangsa indonesia. Partai politik islam ini akan menjadi ujung tombak elemen elemen islamis untuk mencoba melakukan perundingan-perundingan dalam upaya mengubah dasar negara menjadi nasionalis islamis di indonesia<sup>23</sup> .

Dalam perkembangannya terdapat beberapa kali pertarungan tajam yang dilakukan melalui pertemuan antara pihak nasionalis sekuler dengan nasionalis islam dimana perundingan tersebut selalu mengalami jalan buntu dalam mencapai sebuah kesepakatan untuk merumuskan ideologi nasional. Setiap kali musyawarah yang dilakukan selalu pihak islam mengalami kekalahan suara karena mayoritas suara tidak menginginkan tujuan adanya pembentukan ideologi nasional yang bercorak islam<sup>24</sup>. Hal tersebut berdampak kepada Dalam lembaga konstitusi yang mana dari kubu islam selalu walk out bahkan tidak menghadiri rapat yang sepantasnya dilakukan berkala. Politik pada saat itu terbilang pelik yang mempengaruhi kestabilan nasional dan keamanan negara. Hal tersebut akhirnya mulai diperhatikan oleh presiden ir.soekarno dengan mengeluarkan dekrit presiden pada 5 Juli 1959. Dekrit itu memuat salah satunya mengenai pembubaran lembaga konstituante dan memutuskan untuk menyatakan kembali UUD 1945 yang sudah dibuat.

#### **a. Terbentuknya Masyumi**

Kemunculan masyumi dalam kontestasi politik memunculkan pemikiran bagaimana masyumi ini tumbuh dan mampu bersaing dalam dunia perpolitikan di indonesia. Dalam sejarahnya kemunculan masyumi pada awalnya didasari pada sebuah perkumpulan organisasi islam yang dibentuk pada masa penjajahan jepang di indonesia. Pada waktu itu Jepang memberikan izin untuk memperbolehkan menghidupkan kembali sebuah majlis yang dahulu dibubarkan bernama nama majelis A'la indonesia-MIAI pada tanggal 4 September 1942. Madjlis ini dulunya dibentuk oleh para ulama islam pada sekitar tahun 1937 dan memiliki pengikut dari berbagai organisasi islam pada saat itu seperti muhammadiyah, NU hingga organisasi islam lainnya<sup>25</sup> . Kemunculan majlis ini diterima baik oleh berbagai organisasi islam pada saat itu. Anggapannya bahwa madjlis ini menjadi sarana untuk saling tukar pikiran dari setiap kelompok maupun organisasi islam pada saat itu sembari memikirkan untuk menghimpun kekuatan islam pada masa pendudukan jepang.

---

<sup>23</sup> Gonda Yumitro, "Partai Islam dalam Dinamika Demokrasi di Indonesia," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 17 (2013): 22.

<sup>24</sup> Ishak, "PERGERAKAN PARTAI MASYUMI DI INDONESIA 1945-1960."

<sup>25</sup> Faiq Nur Khumaidi, "PEMIKIRAN MODERN ISLAM DALAM PARTAI MASYUMI TAHUN 1945 - 1960" 11, no. 1 (2021): 9.

Tepat tanggal 3 November 1945 setelah masa-masa kemerdekaan Indonesia, pemerintah Indonesia membuka anjuran untuk membentuk sebuah partai politik. Anjuran tersebut dimanfaatkan secara baik bagi umat Islam khususnya Majelis Islam Indonesia untuk membentuk sebuah partai politik yang digunakan sebagai wadah aspirasi umat Islam dalam menyalurkan pemikiran-pemikirannya sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia khususnya demi perjuangan dan kemaslahatan umat Islam di Indonesia. Tepat pada tanggal 7 dan 8 November 1945 diadakanlah sebuah Muktamar Islam Indonesia yang dihadiri berbagai tokoh dan cendekiawan Islam dari berbagai organisasi di seluruh Indonesia. Dalam kongres Muktamar ini memberikan keputusan untuk mendirikan sebuah Majelis Syuro bagi umat Islam Indonesia (MASYUMI) sebagai partai politik (Madinier, 2015) <sup>26</sup>. Pembentukan partai politik ini menyedot berbagai khalayak umum masyarakat terkhusus masyarakat Islam dimana branding dari partai politik Masyumi ini dengan mendirikan sebuah surat kabar tahun 1947 yang digunakan untuk mempermudah dalam menyebarluaskan partai Masyumi ini dan memberikan informasi terkait perkembangan partai politik Islam di Indonesia saat itu. Dalam perkembangan awal partai politik Masyumi ini mendapat dukungan dari berbagai organisasi Islam pada saat itu terkhusus Nahdlatul Ulama (NU) (Khumaidi, 2021). NU memiliki peran sentral dalam pembentukan serta perkembangan awal Masyumi di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan ketua tertinggi Masyumi pertama diemban oleh tokoh terpendang di NU yaitu KH. Hasyim Asy'ari. Selain itu juga banyak para tokoh Nahdlatul Ulama yang memutuskan untuk bergabung ke dalam partai Masyumi ini yang tidak dihindari Nahdlatul Ulama harus ikut terjun ke dalam partai politik ini dan hal ini sulit dihindarkan dalam keterlibatannya.

Jika ditarik dalam suasana pasca kemerdekaan, Umat Islam tidak memiliki kekuatan yang lebih dalam untuk mendesak atau hanya sekedar memberikan masukan karena memang tidak mempunyai wadah yang cukup kuat, akan tetapi berbeda sejak didirikannya Masyumi sebagai sebuah partai politik Islam, dimana kelahiran partai politik tersebut membawa angin segar dan perubahan bagi rakyat Indonesia terkhusus umat Islam. Masyumi lahir sebagai sebuah wadah persatuan perjuangan agama Islam di Indonesia sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa sebagian umat Islam mulai melirik dan tertarik Indonesia kepada partai politik Islam ini. Kurang lebih 4 tahun berdirinya Masyumi rakyat yang menganut agama

---

<sup>26</sup> Remy Madinier, *Islam and Politics in Indonesia: The Masyumi Party between Democracy and Integralism*, ed. Jeremy Desmond (NUS Press, 2015), accessed October 11, 2022, <https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/26106>.

islam berbondong-bondong untuk ikut bergabung dalam partai tersebut<sup>27</sup>.

Kemudian perkembangan Masyumi bisa terbilang semakin pesat dan signifikan ketika para organisasi lokal mulai bergabung dalam partai tersebut. Organisasi-organisasi lokal yang bergabung dalam keanggotaan partai masyumi mendapatkan hak istimewa dalam keanggotaannya. setidaknya terdapat berbagai organisasi islam bersifat lokal yang mulai bergabung dalam partai masyumi ini di antaranya :

- 1) Bergabungnya organisasi bernama partai umat islam dan perikat umat islam di susul dengan bergabungnya organisasi bernama persatuan islam bandung, ami'ah AlWasliyah dan Al-Ittihadiyah dari sumatera pada tahun 1948
- 2) Persatuan ulama seluruh aceh (PUSA) bergabung pada tahun 1959
- 3) Kemudian juga terdapat organisasi Al-irsyad, Mathul Anwar di Banten dan Nahdatul Wathan di Lombok pada tahun 1950.

Bergabungnya organisasi-organisasi di atas berdampak baik kepada perkembangan partai masyumi dimana hal itu juga dijadikan sebagai strategi partai masyumi untuk mempermudah dalam menyebarluaskan pengaruhnya ke seluruh indonesia. Tepat pada tanggal 26 oktober 1946 juga masyumi berhasil mendirikan sebuah organisasi yang menysar kepada golongan rakyat menengah ke bawah. Organisasi yang dibuat oleh masyumi pertama adalah Serikat Tani Islam Indonesia (STII). Kemudian pada tanggal 27 november 1947 Masyumi kembali membentuk sebuah organisasi atau perkumpulan yang dinamakan Serikat buruh islam indonesia (SBII) serta pada tahun 1950 masyumi melahirkan kembali sebuah organisasi yang bernama Serikat nelayan islam indonesia (SNII). Ketiga organisasi tersebut dibuat dengan tujuan agar partai masyumi mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat yang ada di indonesia. Partai masyumi berhasil menggandeng kekuatan militer dari hizbullah dan hal ini menjadi bukti bahwa partai masyumi benar-benar serius dalam menghimpun serta mengkoordinir semua elemen islam di indonesia<sup>28</sup>.

Kemudian berkaitan dengan arah gerak atau ideologi yang dibawa oleh partai masyumi merupakan sebuah perwujudan dan keinginan dari partai tersebut untuk menegakan ajaran islam di dalam masyarakat maupun bernegara. Ideologi yang diemban oleh masyumi ini

---

<sup>27</sup> Ibid.

<sup>28</sup> Ishak, "PERGERAKAN PARTAI MASYUMI DI INDONESIA 1945-1960."

bukan semata-mata ingin melakukan perebutan ideologi bangsa indonesia yang memang sudah diputuskan bahwa ideologi bangsa indonesia merupakan pancasila. akan tetapi jika dilihat dari pijakan partai masyumi ini terdapat tujuan serta garis haluan partai ini memiliki pandangan “ menjadikan kedaulatan republik indonesia dan agama islam dan melaksanakan cita-cita islam dalam urusan negaranya “ (ADRT masyumi 1925 pasal 11). Masyumi memiliki ambisi untuk mencapai cita citanya dalam menjadikan kenegaraan indonesia berlandaskan islam serta keinginan untuk menyempurnakan dasar-dasar pada undang-undang Dasar RI dengan mewujudkan masyarakat serta ketatanegaraan islam.

#### **b. Perkembangan Masyumi 1945-1949**

Masyumi mengalami pasang surut di dalam perkembangannya. Partai masyumi dalam kurun waktu 5 tahun menjadi kubu oposisi dalam pemerintahan. Meskipun memang dalam realitasnya banyak tokoh-tokoh dari masyumi yang berhasil menduduki susunan perdana menteri bangsa indonesia, akan tetapi masyumi masih menunjukkan sikap kritisnya kepada pihak pemerintah ketika memutuskan sebuah kebijakan. Selama 1945-1949 masyumi berhasil melakukan serangkaian penentangan dengan sikap yang diambil olehnya dan tidak jarang masyumi diminoritaskan oleh kelompok sekuler di beberapa perdana menteri yang pada saat itu menjabat<sup>29</sup>. hal tersebut meliputi :

- a) Pada pemerintahan sjahrir 1945, masyumi tidak diikutsertakan dalam susunan kabinet pemerintahan. Meskipun terdapat salah satu tokoh yang menduduki sebuah jabatan di departemen agama yang dibentuk tanggal 3 januari 1946. Tokoh tersebut disinyalir dilarang membawa embel-embel partai masyumi dan merupakan tokoh independen. Selain itu juga bahwa adanya pernyataan sikap yang dilakukan oleh masyumi berkaitan dengan kebijakan menyikapi masalah imperialis. Masyumi dengan tegas menyatakan sikap tidak setuju atas hasil dari keputusan tersebut yang berdampak kepada pengembalian mandat sjahrir kepada Ir,soekarno.
- b) Pada masa kabinet sjahrir II dan III masyumi memperoleh kedudukan yang cukup layak dalam pemerintahan dimana beberapa tokoh berhasil masuk di susunan kabinet pemerintahan. Meskipun memang banyak tokoh yang mulai masuk di dalam susunan pemerintahan, masyumi masih memegang sikap kritisnya kepada pihak pemerintah dengan menyatakan rasa kekecewaan atas hasil dari perundingan linggarjati. Masyumi menganggap bahwa perjanjian tersebut merugikan RI. Atas

---

<sup>29</sup> Ibid.

dasar sikap kritis tersebut menyebabkan perdana menteri sjafrudin III menyerahkan mandatnya kepada presiden pada tahun 1947.

- c) Pada pemerintahan kabinet Amir sjarifudin I (3 Juli 1947-11 November 1947) dan Amir sjarifudin II (11 November 1947-29 Januari 1948) mengalami nasib yang serupa terhadap kabinet sebelumnya dengan menerima berbagai kritikan dari partai masyumi hal ini dibuktikan dengan beberapa tokoh dari masyumi yang menarik diri dari kabinet atas kekecewaan dari perjanjian renville yang ditandatangani oleh perdana menteri amir syarifudin.
- d) Kemudian pada kabinet hatta. Pada pemerintahan perdana menteri hatta masyumi memiliki pengaruh yang kuat atas berbagai peristiwa yang terjadi ketika pemerintahan kabinet hatta. Dalam berbagai peristiwa yang terjadi seperti munculnya gerakan Darul islam, pemberontakan PKI dan agresi militer belanda, masyumi turut andil dalam peleraian permasalahan tersebut. Pada agresi militer belanda masyumi hadir dalam upaya meleraai agresi tersebut. Dalam peristiwa agresi militer yang dilakukan pada tahun 1948 yang berakibat beberapa wilayah dikuasai oleh belanda, dari kubu masyumi berhasil melakukan diplomasi dan memang dari diplomasi ini membuat sebuah kesepakatan gencatan senjata dan pada tanggal 14 april 1949 PBB mulai melirik permasalahan ini kemudian diselesaikan oleh PBB yang kemudian menjadi akhir dari agresi militer belanda. Keberhasilan ini juga di imbangi dengan kemunduran masyumi akibat adanya gerakan darul islam yang dipimpin oleh tokoh bernama kartosuwiryo yang menyebabkan timbulnya perpecahan di dalam tubuh masyumi. Banyak anggota masyumi yang lari dan beralih kepada darul islam untuk mendirikan agama islam.

Pernyataan di atas merupakan perjalanan partai masyumi di masa revolusi pasca kemerdekaan. Masyumi mempunyai pengaruh yang amat besar bagi perkembangan bangsa indonesia meskipun di satu sisi bahwa mulai timbulnya akar-akar perpecahan yang terlihat namun hal itu masih mampu ditangani dan dirundingkan antara pihak pemerintah dengan masyumi pada masa itu.

### **c. Kemunduran hingga berakhirnya masyumi**

Dalam perkembangannya indonesia merubah struktur sistem pemerintahan menjadi

demokrasi parlementer. Pada saat itu presiden soekarno diberi kekuasaan menunjuk perdana menteri pertama pada demokrasi parlementer ini. Presiden akhirnya menunjuk ketua masyumi pada saat itu yaitu M.Natsir. M.natsir menjadi perdana menteri pertama pada masa demokrasi parlementer. Dalam masa pemerintahan M.Natsir yang dimulai 1950, beliau mengalami kegagalan dalam menjalankan sebuah pemerintahannya dalam menangani irian barat. Kegagalan tersebut berakibat kepada presiden soekarno yang menyetujui untuk membatalkan perjanjian KMB secara unilateral, kemudian memberikan sanksi dalam bidang ekonomi kepada belanda<sup>30</sup>.

Dalam sidang kabinet negara. Ir soekarno memberikan pidatonya yang salah satunya menekankan kembalinya irian barat ke indonesia sebelum tanggal 1 januari 1951. Namun saran yang diberikan oleh soekarno ini ditolak oleh perdana menteri Natsir didukung dengan hasil voting yang sebagian besar mendukung perdana menteri natsir. Keputusan ini menjadi awal memburuknya hubungan antara soekarno dengan natsir dan masyumi sampai berlanjut ke periode-periode selanjutnya<sup>31</sup>.

Memburuknya hubungan antara soekarno dengan masyumi semakin berlanjut pada kabinet selanjutnya. Perseteruan antara kabinet dengan masyumi terjadi lagi pada saat kabinet sukiman. Perbedaan pendapat antara soekarno dengan sukiman berkaitan dengan pihak soekarno yang tidak menyetujui mengenai perdamaian jepang dan menerima segala bentuk bantuan dari AS. Sementara itu sukiman memiliki pandangan lain dengan berfokus membersihkan PKI di indonesia<sup>32</sup>.

Kekisruhan ini berlanjut pada kabinet wilopo dengan perdebatan ideologi negara indonesia antara soekarno dan masyumi. Perbedaan pendapat ini muncul akibat pidato yang dilontarkan oleh soekarno pada tanggal 27 Januari 1953 tentang keinginan negara indonesia menjadi negara nasional bukan negara berdasarkan dan berlandaskan islam. Pernyataan yang dilontarkan oleh soekarno ini mendapat berbagai tanggapan yang beragam dari berbagai kalangan terkhusus para tokoh masyumi.

Singkat perjalanan ketika waktu demi waktu soekarno semakin renggang dengan partai masyumi, pada tanggal 12 Maret 1953 pergantian kabinet dilakukan antara wilopo dengan Ali I. Pada masa inilah untuk pertama kalinya partai masyumi tidak ikut duduk dalam kabinet, sehingga secara tidak langsung menempatkan masyumi sebagai poros oposisi. Hal ini berlanjut ketika kabinet dipimpin oleh burhanudin harahap (1955-1956) dan ali II

---

<sup>30</sup> Khumaidi, "PEMIKIRAN MODERN ISLAM DALAM PARTAI MASYUMI TAHUN 1945 -1960."

<sup>31</sup> Ibid.

<sup>32</sup> Sukamto, "Ketegangan Antar Kelompok Agama Pada Masa Orde Lama Sampai Awal Orde Baru."

(1956-1957) kekisruhan ini tidak selesai dan menunjukkan bahwa periode Masa kabinet ini tidak efektif malah menambah keruncingan kerenggangan kedua belah pihak. Tepat tanggal 21 Februari 1957 soekarno berhasil membongkar permasalahan ini dengan mengusulkan akan adanya reformasi demokrasi terpimpin yang baru dengan memperlihatkan corak kepribadian nasional. Pemerintahan yang baru ini akan lebih berfokus pada asas “gotong royong” yang terdiri dari beberapa partai yang bersifat nasionalis termasuk PKI.

Dalam pelaksanaan demokrasi terpimpin yang dimulai ketika dikluarnya dekrit presiden tanggal 5 Juli 1959, pihak masyumi semakin melemah dengan berbagai tekanan yang dilontarkan oleh pihak lain. Kelemahan ini terjadi di semua aspek pada partai masyumi dimana eksistensi dari partai masyumi semakin merosot dan dipandang buruk oleh beberapa kalangan hingga akhirnya soekarno mengeluarkan keputusan NO.200 tahun 1960 yang menjelaskan bahwa larangan adanya multi partai yang ada di indonesia. Dalam pandangan soekarno menjelaskan bahwa partai itu cukup satu, tidak dua ataupun tiga, hal itu akan membingungkan masyarakat dan massa<sup>33</sup>.

Akibat keputusan presiden NO.200 tahun 1960 partai masyumi mau tidak mau harus membubarkan diri sebagai partai politik. Pembubaran ini dilakukan secara resmi melalui suratnya No. 1801 BNI 25/60 tanggal 13 September 1960. Meskipun partai masyumi melakukan gugatan terhadap soekarno. Hal tersebut menuai jalan buntu karena adanya intervensi yang dilakukan oleh soekarno pada pengadilan tersebut. Akhirnya partai masyumi terpaksa membubarkan diri dari politik indonesia untuk menghindari cap sebagai partai politik terlarang .

## **E. KESIMPULAN**

Dibubarkannya partai masyumi menjadi akhir dari perjuangan agama islam pada masa pemerintahan soekarno. Perjalanan elemen islam dalam aspek politik dari masa ke masa memberikan sebuah realitas bahwa bangsa indonesia tidak mampu bisa di rubah berkaitan dengan ideologinya ke dalam suatu pihak. Dalam pembubaran masyumi juga menjadi bukti berakhirnya perjuangan partai islam modernis kepada kelompok nasional sekuler atas landasan keotoriteran politik pada saat itu. Perkembangan partai politik islam meninggalkan sebuah jejak berkaitan dengan kecacatan demokratis pada saat itu dan akan menjadi sebuah pengingat untuk membangun politik di masa yang sekarang dan yang akan datang.

---

<sup>33</sup> Alfi Hafidh Ishaqro, “Dinamika Partai Masyumi Pada Masa Revolusi Fisik (1945-1949),” *AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA* 5, no. 02 (July 10, 2015): 27.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anis, Anis. "Muhammadiyah Dalam Penyebaran Islam." *Jurnal Mimbar: Media Intelektual Muslim dan Bimbingan Rohani* 5, no. 2 (October 7, 2019): 65–80.
- Argenti, Giri, and Maulana Rifai. "Islam Politik Era Refomasi Pergulatan Ideologi Partai Politik Islam Antara Formalis dan Subtansi." *Majalah Ilmiah SOLUSI* 1, no. 04 (2014). Accessed September 28, 2022. <https://journal.unsika.ac.id/index.php/solusi/article/view/63>.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar ilmu politik*. Cet. pert. rev. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Darmalaksana, Wahyudin. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan." *Pre-print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung* (2020). Accessed October 13, 2022. <http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/32855>.
- Ikrar, Ikrar. "PARTAI-PARTAI ISLAM DI INDONESIA (Latar Belakang dan Dinamika Perjalanannya)." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 1, no. 2 (August 11, 2016). Accessed September 28, 2022. <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/199>.
- Ishak, Noor. "PERGERAKAN PARTAI MASYUMI DI INDONESIA 1945-1960" (2008): 108.
- Ishaqro, Alfi Hafidh. "Dinamika Partai Masyumi Pada Masa Revolusi Fisik (1945-1949)." *AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA* 5, no. 02 (July 10, 2015): 27.
- Jainuddin, Jainuddin. "ISLAM DAN POLITIK ORDE LAMA; 'DINAMIKA POLITIK ISLAM PASCA KOLONIAL SEJAK KEMERDEKAAN SAMPAI AKHIR KEKUASAAN SOEKARNO.'" *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 3, no. 2 (October 14, 2019): 225–243.
- Khumaidi, Faiq Nur. "PEMIKIRAN MODERN ISLAM DALAM PARTAI MASYUMI TAHUN 1945 -1960" 11, no. 1 (2021): 9.
- Madinier, Remy. *Islam and Politics in Indonesia: The Masyumi Party between Democracy and Integralism*. Edited by Jeremy Desmond. NUS Press, 2015. Accessed October 11, 2022. <https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/26106>.
- Nafi', Moh. "NU DALAM PERKEMBANGAN PEMIKIRAN PENDIDIKAN ISLAM." *Ta'Limuna: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (June 22, 2018): 96–112.
- Nugroho, Anjar. "Wacana Islam Dan Negara Era Pra-Kemerdekaan: Pergulatan Ideologis Kelompok Islam Dan Nasionalis Sekuler." *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies* 9, no. 2 (July 28, 2013): 129–147.
- Sukamto, Amos. "Ketegangan Antar Kelompok Agama Pada Masa Orde Lama Sampai Awal Orde Baru: Dari Konflik Perumusan Ideologi Negara Sampai Konflik Fisik." *Indonesian Journal of Theology* 1, no. 1 (July 21, 2013): 25–47.
- Sukamto, Dr. "DINAMIKA POLITIK ISLAM DI INDONESIA" (n.d.): 30.

Taufik Karim Lubis, -. "PERANAN SEMAUN DALAM PERKEMBANGAN SAREKAT ISLAM SEMARANG TAHUN 1914-1920." Other, Universitas Pendidikan Indonesia, 2017. Accessed October 11, 2022. <http://repository.upi.edu>.

Yumitro, Gonda. "Partai Islam dalam Dinamika Demokrasi di Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 17 (2013): 22.